

DAFTAR PUSTAKA

- Cheisviyanny, C. (2020). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang dan Kota Solok). *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 1(2), 64-74.
- Fitria, A. (2020). Analisis Pemahaman Pajak oleh Bendahara Desa pada Keuangan Desa (Studi pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso).
- Gruber, J. (2016). *Public Finance and Public Policy Fifth Edition*. Worth Publisher.
- Handayani, N., & Zahro, M. (2021). Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 62-79.
- Kementerian Keuangan. (2015). PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Kementerian Keuangan. (2018). PMK Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lainnya.
- Kementerian Keuangan. (2019). PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.
- Kementerian Keuangan. (2020). PMK Nomor 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Kurachman, T. (2020). Tinjauan Manfaat Penetapan Jangka Waktu Tertentu Bagi Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal BPPK*, 13(2), 53-64.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Mardiyati. (2018). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sleman Tahun 2017.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Radar Indonesia News. (2018). *Dugaan Rangkap Jabatan Bendahara BOS Di Satker MTs Kabupaten Kediri*. Diambil kembali dari <https://www.radarindonesianews.com/dugaan-rangkap-jabatan-bendahara-bos-di/>
- Safitra, D. A., & Swasito, A. P. (2020). *Perpajakan 2*. PKN STAN.